

Efektivitas Kinerja Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Nabire yang Berbasis Gender

Sutriani B^{1*}, Kristian H.P. Lambe², Corvis L. Rantererung

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

sutrianialfin@gmail.com¹

*Penulis korespondensi

Abstrak

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Nabire yang menuntut kinerja organisasi publik yang efektif dan responsif gender. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Nabire dalam mengimplementasikan program berbasis gender, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta merumuskan upaya peningkatan kinerja dalam kerangka pengarusutamaan gender. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pejabat dan pegawai DP3A serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja DP3A belum optimal, terutama dalam aspek perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, serta koordinasi lintas sektor. Faktor internal seperti keterbatasan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia, sistem monitoring yang belum terintegrasi, serta keterbatasan sarana prasarana menjadi hambatan utama. Sementara itu, faktor eksternal berupa kondisi sosial budaya masyarakat dan lemahnya sinergi antar lembaga turut memengaruhi capaian kinerja. Peningkatan efektivitas kinerja dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem monitoring kinerja, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan komitmen kelembagaan terhadap prinsip pengarusutamaan gender. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan manajemen kinerja organisasi publik berbasis gender di tingkat daerah.

Kata kunci: efektivitas kinerja, pengarusutamaan gender, DP3A, manajemen kinerja publik, perlindungan perempuan dan anak.

Abstract

Gender-based violence against women and children remains a serious issue in Nabire Regency, requiring effective and gender-responsive performance from public sector organizations. This study aims to analyze the performance effectiveness of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) of Nabire Regency in implementing gender-based programs, to identify factors influencing performance effectiveness, and to formulate strategies for performance improvement within the framework of gender mainstreaming. This research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving DP3A officials and relevant stakeholders. The findings indicate that DP3A's performance effectiveness has not yet been optimal, particularly in program planning, performance monitoring and evaluation, and cross-sectoral coordination. Internal constraints include limited human resource capacity, inadequate performance monitoring systems, and insufficient supporting facilities. External factors such as socio-cultural conditions and weak inter-agency collaboration also affect performance outcomes. Efforts to enhance performance effectiveness involve strengthening human resource capacity, improving performance monitoring systems, reinforcing cross-sectoral coordination, and strengthening institutional commitment to gender mainstreaming principles. This study provides empirical contributions to the development of gender-based public sector performance management at the local government level.

Keywords: performance effectiveness, gender mainstreaming, DP3A, public sector performance management, women and child protection.

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender merupakan persoalan serius yang terus menjadi tantangan di Indonesia meskipun upaya legislasi dan perlindungan telah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024 sebesar 2,4% dibanding tahun sebelumnya, dengan berbagai bentuk kekerasan terjadi di beragam ruang sosial (rumah tangga, sekolah, tempat kerja) dan melibatkan semua kelompok usia, termasuk anak-anak dan remaja (Komnas Perempuan, 2025). Sementara itu, data Polri juga menunjukkan angka kasus kekerasan berbasis gender yang sangat tinggi pada 2025, mencapai lebih dari 36.000 kasus dengan tingkat penyelesaian perkara rendah (<13%), terutama terkait kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan manusia (ANTARA News, 2025). Meskipun survei nasional menunjukkan tren penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa indikator tertentu, angka relaps kasus dan besarnya angka absolut menunjukkan bahwa perlindungan efektif bagi perempuan dan anak belum memadai (UNFPA, 2025).

Berdasarkan data tersebut, fenomena kekerasan berbasis gender menunjukkan tren yang kompleks: peningkatan pelaporan kasus, tingginya volume kasus baru setiap tahun, serta tantangan signifikan dalam penanganan dan perlindungan korban. Peran organisasi publik di tingkat daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), memiliki peranan strategis dalam sistem respons gender. Namun, terdapat indikasi belum optimalnya pelaksanaan program berbasis gender dan koordinasi lintas sektor dalam konteks pelayanan, pencegahan, serta pemulihan korban, sebagaimana dicermati dalam kajian implementasi kebijakan *gender mainstreaming* di pemerintahan daerah lainnya di Indonesia (Takayasa, 2023).

Tabel 1. Fakta Pendukung

Indikator/Kasus	Data	Sumber
Jumlah kasus GBV Indonesia (2025)	±36.148 kasus	ANTARA News (2025)
Kenaikan laporan kekerasan perempuan (2024)	+2.4%	Komnas Perempuan (2025)

Indikator/Kasus	Data	Sumber
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (lifetime)	1 dari 4 wanita	UNFPA (2025)
Peningkatan kasus GBV sejak survei 2015	>2,7 juta kasus	Komnas Perempuan (2025)

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber (2026)

Sumber data di atas menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan struktural dan sistemik di Indonesia, meskipun terdapat upaya penurunan di beberapa indikator survei nasional. Peran dinas teknis di tingkat kabupaten/kota menjadi krusial dalam menjembatani kebijakan nasional dengan implementasi layanan yang responsif gender pada level lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis efektivitas kinerja DP3A di Kabupaten Nabire dalam merespon fenomena kekerasan berbasis gender yang signifikan dan beragam, serta untuk mengidentifikasi faktor yang membatasi kinerja organisasi publik tersebut. Secara konseptual, pemahaman terhadap aspek perencanaan, koordinasi lintas sektor, monitoring-evaluasi, dan kapasitas kelembagaan menjadi syarat mutlak untuk merumuskan rekomendasi strategis yang relevan dalam memperkuat respons gender di tataran implementasi layanan publik daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas kinerja DP3A Kabupaten Nabire dalam mengimplementasikan program berbasis gender?
2. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas kinerja DP3A dalam konteks pengarusutamaan gender?
3. Strategi apa yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja DP3A dalam penanganan kekerasan berbasis gender di Kabupaten Nabire?

TINJAUAN LITERATUR

Teori Utama (Grand Theory)

Penelitian ini berpijak pada dua perspektif teoretis utama dalam kajian administrasi publik dan kebijakan gender: Teori Administrasi Publik dan Teori Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*).

Teori Administrasi Publik dan Kinerja Organisasi

Teori administrasi publik menekankan bahwa organisasi sektor publik harus mampu mengoptimalkan struktur, budaya organisasi, serta mekanisme kontrol dan evaluasi untuk mencapai efektivitas layanan publik (Wilson, 1887; bureaucratic theory). Dalam konteks kinerja organisasi publik, studi kontemporer menunjukkan bahwa desain *governance* yang selaras dengan mekanisme kinerja dan motif organisasi dapat meningkatkan hasil layanan (Virani, 2023). Pandangan ini menegaskan pentingnya integrasi antara tata kelola, inovasi organisasi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai dasar pencapaian efektivitas kinerja organisasi publik (Maqdliyan & Setiawan, 2023).

Teori Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)

Gender mainstreaming dipandang sebagai strategi untuk memastikan bahwa isu gender dimasukkan secara sistematis ke dalam semua tahap pembuatan kebijakan, program, dan evaluasi organisasi publik (Takayasa, 2023). Strategi ini berangkat dari Intergovernmental mandats seperti *UN ECOSOC* dan dintegrasikan ke dalam kebijakan nasional termasuk Instruksi Presiden Indonesia tentang *Gender Mainstreaming* (Presidential Instruction No. 9/2000) yang menyatakan bahwa seluruh kebijakan publik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan dan laki-laki secara setara.

Implementasi *gender mainstreaming* secara efektif memerlukan prasyarat-prasyarat seperti komitmen kelembagaan, kapasitas SDM, data terdisagregasi, dan koordinasi lintas sektor (Takayasa, 2023). Hal ini selaras dengan penelitian lain yang menyoroti integrasi budaya organisasi yang mendukung kesetaraan gender, komunikasi yang substansial, serta sistem monitoring yang konsisten sebagai determinan keberhasilan penerapan *gender mainstreaming* (Mayasari, Dama & Situmorang, 2025).

Efektivitas Kinerja Organisasi Publik

Efektivitas dalam konteks organisasi publik diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan program, menghantarkan layanan sesuai standar, serta memenuhi harapan pemangku kepentingan. Penelitian administrasi publik kontemporer menekankan bahwa efektivitas kinerja organisasi ditentukan oleh

struktur *governance*, budaya organisasi, serta kemampuan adaptasi terhadap tuntutan perubahan sosial (Virani, 2023).

Pelayanan Publik Responsif Gender

Pelayanan publik responsif gender adalah layanan yang tidak hanya adil secara formal tetapi juga memberikan perlakuan yang tepat dan setara kepada semua gender, serta memastikan bahwa kebutuhan berbasis gender termasuk kebutuhan korban kekerasan dipenuhi secara efektif melalui pendekatan layanan yang sensitif gender. Konsep ini dipandang sebagai bagian dari *good governance* dan hak asasi warga negara (UNDP, 2021).

Asumsi dan Perspektif Konseptual

Penelitian kualitatif ini juga didasarkan pada asumsi konseptual bahwa situasi sosial dan budaya lokal memengaruhi bagaimana kebijakan *gender mainstreaming* diinternalisasikan dalam praktik organisasi publik. Asumsi ini mengacu pada pendekatan interpretatif yang melihat organisasi sebagai arena ruang sosial di mana nilai, norma, dan struktur birokrasi saling berinteraksi secara dinamis.

Menurut kerangka kerja ini, keberhasilan implementasi *gender mainstreaming* tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kapasitas internal organisasi, perilaku aparatur, dan persepsi masyarakat terhadap isu gender. Perspektif ini sejalan dengan kajian qualitative interpretative dalam politik publik yang menekankan pentingnya memahami konteks praksis dalam implementasi kebijakan (Takayasa, 2023).

Selain itu, literatur administrasi publik menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan (*leadership*), budaya organisasi, dan komunikasi internal menjadi determinan penting dalam proses perubahan organisasi yang responsif terhadap tuntutan sosial baru termasuk gender equity (Maqdliyan & Setiawan, 2023).

Berdasarkan tinjauan pustaka dan teori yang dikemukakan di atas maka penulis menggambarkan Kerangka Pemikiran dari penelitian ini seperti pada **Gambar 1** berikut ini.



Sumber: Pemikiran penulis (2026)

Gambar 1. Alur pikir

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Nabire dalam mengimplementasikan program berbasis gender. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial dan kelembagaan secara kontekstual, serta menangkap makna, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (Creswell & Poth, 2018; Tracy, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut memiliki mandat strategis dalam perumusan dan implementasi program perlindungan perempuan dan anak serta penanganan kekerasan berbasis gender di tingkat daerah. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, mencakup tahapan pengumpulan data lapangan, verifikasi data, hingga analisis hasil penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program DP3A Kabupaten Nabire. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berbasis gender. Informan penelitian meliputi pejabat struktural DP3A, staf pelaksana program, serta pihak terkait lainnya yang memiliki pemahaman substantif mengenai kebijakan dan praktik pengarusutamaan gender. Teknik ini dipandang tepat dalam penelitian kualitatif karena berorientasi pada kedalaman

informasi, bukan pada jumlah responden (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016; Palinkas et al., 2015).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta interpretasi informan terhadap efektivitas kinerja DP3A. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses kerja dan interaksi organisasi, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen perencanaan, laporan kinerja, serta regulasi yang relevan. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data melalui triangulasi sumber dan metode (Nowell et al., 2017).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dimulai dengan pengkodean data hasil wawancara dan dokumen, kemudian mengelompokkan kode ke dalam tema-tema utama yang merepresentasikan dimensi efektivitas kinerja, faktor penghambat, serta strategi peningkatan kinerja. Analisis tematik dipilih karena fleksibel dan mampu mengidentifikasi pola makna dalam data kualitatif secara sistematis dan transparan (Braun & Clarke, 2019). Validitas temuan diperkuat melalui proses pengecekan ulang data dan diskusi interpretatif untuk memastikan konsistensi dan ketepatan makna hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Nabire. Informan terdiri dari pejabat struktural DP3A, staf pelaksana program, serta pihak terkait yang memiliki pengalaman dan pengetahuan substantif mengenai implementasi pengarusutamaan gender. Secara umum, informan memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana dan telah bekerja di DP3A atau instansi terkait selama lebih dari tiga tahun, sehingga dianggap memahami secara memadai dinamika kelembagaan dan operasional program.

Karakteristik informan ini memberikan kontribusi penting terhadap kedalaman data, karena mereka tidak hanya memahami kebijakan secara normatif, tetapi juga realitas implementasi

di lapangan, termasuk tantangan administratif, sosial, dan kultural yang dihadapi DP3A dalam menangani isu kekerasan berbasis gender.

Analisis Tematik

Berdasarkan proses pengkodean dan pengelompokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh **tiga tema utama** yang merepresentasikan efektivitas kinerja DP3A Kabupaten Nabire dalam implementasi program berbasis gender.

Tabel 2. Hasil Analisis Tematik Penelitian

Tema Utama	Subtema	Makna Tematik
Efektivitas Kinerja Organisasi	Perencanaan program, pelaksanaan layanan, pencapaian tujuan	Kinerja DP3A belum sepenuhnya efektif dalam mencapai target program berbasis gender
	SDM, sistem monitoring, koordinasi lintas sektor	Hambatan internal dan eksternal mempengaruhi kinerja organisasi
Faktor Penghambat Kinerja	Penguatan kapasitas, koordinasi, komitmen kelembagaan	Upaya perbaikan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas layanan

Sumber: Data hasil wawancara diolah (2026)

Efektivitas Kinerja DP3A dalam Implementasi Program Berbasis Gender

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja DP3A Kabupaten Nabire dalam implementasi program berbasis gender **belum optimal**, khususnya dalam aspek perencanaan program dan pencapaian indikator kinerja. Program-program yang dirancang umumnya telah mengacu pada kebijakan nasional pengarusutamaan gender, namun implementasinya masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil korban.

Seorang informan menyatakan:

“Program sudah ada setiap tahun, tetapi sering kali belum sesuai dengan kondisi lapangan karena keterbatasan data dan waktu perencanaan.” (Informan A, Pejabat DP3A)

Selain itu, layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum

terintegrasi secara optimal dengan lembaga lain, seperti kepolisian, layanan kesehatan, dan lembaga sosial. Hal ini berdampak pada lambatnya proses penanganan kasus dan pemulihan korban.

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa efektivitas kinerja organisasi publik tidak hanya diukur dari keberadaan program, tetapi juga dari kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat serta keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan (Virani, 2023).

Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja DP3A

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa terdapat **faktor internal dan eksternal** yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas kinerja DP3A. Faktor internal utama meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang belum berjalan secara sistematis.

Seorang staf pelaksana program mengungkapkan:

“Jumlah pegawai terbatas, sementara tugas semakin banyak. Monitoring kegiatan masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi.” (Informan B, Staf DP3A)

Faktor eksternal yang berpengaruh antara lain kondisi sosial budaya masyarakat yang masih menganggap kekerasan berbasis gender sebagai urusan domestik, serta lemahnya koordinasi lintas sektor antarinstansi. Persepsi sosial ini menyebabkan rendahnya pelaporan kasus dan membatasi efektivitas program pencegahan.

Temuan ini menguatkan pandangan bahwa implementasi *gender mainstreaming* sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kelembagaan, bukan semata-mata oleh regulasi formal (Takayasa, 2023).

Strategi Peningkatan Efektivitas Kinerja DP3A

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan efektivitas kinerja DP3A memerlukan strategi yang bersifat struktural dan kultural. Strategi utama yang diidentifikasi meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, perbaikan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

Seorang informan menyampaikan:

“Kalau ada sistem kerja yang jelas dan koordinasi dengan instansi lain diperkuat, pelayanan bisa jauh lebih efektif.”
(Informan C, Pemangku Kepentingan Terkait)

Selain itu, penguatan komitmen kelembagaan terhadap prinsip pengarusutamaan gender menjadi prasyarat penting agar program tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar diinternalisasikan dalam budaya kerja organisasi. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya komitmen organisasi dan kepemimpinan dalam mendorong keberhasilan kebijakan responsif gender (Mayasari et al., 2025).

Pembahasan

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pertama, efektivitas kinerja DP3A Kabupaten Nabire dalam implementasi program berbasis gender masih belum optimal, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kedua, faktor internal berupa keterbatasan SDM dan sistem monitoring, serta faktor eksternal berupa kondisi sosial budaya dan lemahnya koordinasi lintas sektor, menjadi determinan utama kinerja organisasi. Ketiga, peningkatan efektivitas kinerja dapat dicapai melalui penguatan kapasitas kelembagaan, sistem monitoring yang terintegrasi, dan komitmen berkelanjutan terhadap prinsip pengarusutamaan gender.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai kinerja DP3A, tetapi juga memperkaya diskursus akademik terkait manajemen kinerja organisasi publik berbasis gender di tingkat pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Nabire dalam mengimplementasikan program berbasis gender **belum berjalan secara optimal**. Meskipun secara normatif DP3A telah memiliki mandat, program, dan struktur organisasi yang mendukung pengarusutamaan gender, implementasi di tingkat operasional masih menghadapi berbagai kendala.

Ketidakefektifan kinerja terutama terlihat pada aspek perencanaan program yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lapangan, sistem monitoring dan evaluasi yang belum terintegrasi, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kekerasan berbasis gender. Faktor internal berupa keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta faktor eksternal berupa kondisi sosial budaya masyarakat dan rendahnya sinergi antarinstansi, menjadi determinan utama yang mempengaruhi capaian kinerja DP3A.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas kinerja organisasi publik dalam konteks pengarusutamaan gender tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan program, tetapi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, komitmen organisasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, pengarusutamaan gender perlu dipahami sebagai proses institusional dan kultural yang berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire perlu memperkuat kapasitas kelembagaan DP3A melalui peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam bidang analisis gender, pendampingan korban, serta monitoring dan evaluasi program. Pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lapangan menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas layanan.

Kedua, diperlukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berbasis data terpilah gender, sehingga capaian program dapat diukur secara lebih akurat dan dijadikan dasar dalam perbaikan kebijakan. Sistem ini juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja DP3A kepada publik.

Ketiga, penguatan koordinasi lintas sektor antara DP3A, kepolisian, fasilitas layanan kesehatan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil perlu diinstitusionalisasikan melalui mekanisme kerja sama formal dan prosedur operasional standar yang jelas. Sinergi ini penting untuk memastikan penanganan

kekerasan berbasis gender dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Keempat, upaya peningkatan kesadaran dan perubahan perspektif masyarakat terkait isu gender perlu menjadi bagian integral dari kebijakan daerah, melalui program edukasi dan sosialisasi yang sensitif terhadap konteks sosial budaya lokal. Pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kekerasan berbasis gender.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kinerja organisasi publik berbasis gender serta meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). *Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan 2024*. Komnas Perempuan.
- Maqdllyan, M. A., & Setiawan, R. (2023). Organizational capacity and public sector performance: Evidence from local government institutions. *Public Organization Review*, 23(4), 945–963. <https://doi.org/10.1007/s11115-023-00678-4>
- Mayasari, D., Dama, H., & Situmorang, R. (2025). Gender mainstreaming in public sector organizations: Challenges and institutional strategies. *Journal of Organizational Studies and Social Environment*, 4(1), 45–60.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Takayasa, R. (2023). Implementasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik daerah. *Jurnal Perempuan dan Wacana Publik*, 18(2), 101–118.
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- United Nations Development Programme. (2021). *Gender equality in public administration*. UNDP.
- United Nations Population Fund. (2025). *The Indonesian national women's life experience survey (SPHPN) 2024: Violence against women*. UNFPA Indonesia.
- Virani, S. (2023). Governance design and performance management in public organizations. *Public Performance & Management Review*, 46(3), 615–634. <https://doi.org/10.1080/15309576.2023.2173649>